

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Cinda Nilam Baiduri

NPP. 31.0617

Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Public

Email : cindanilambaiduri@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Faria Ruhana, SP., MP

ABSTRACT (in english)

Problem (GAP) : *The Palangka Raya City Government strives to continue to improve the quality and develop the competence of its apparatus resources, one of which is through Palangka Raya Mayor Regulation Number 49 of 2015 concerning guidelines for the Provision of Learning Assignments. Study Permits and Scholarships for Civil Servants in the Palangka Raya City Government, but there are several inhibiting factors in implementing them. **Objective :** to describe and analyze how the policy for granting study permits and study assignments in Palangka Raya City is implemented, the inhibiting factors and the efforts that have been made by the Palangka Raya City Human Resources Personnel Agency (BKPSDM) in overcoming the obstacles that occur. **Method :** This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data used is data obtained from interviews, observations and documentation with informants determined using purposive sampling and quota sampling techniques. The data was analyzed using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and data triangulation. Data analysis uses Edwards III's (1980) theory regarding Policy Implementation. **Results :** the implementation of study permits interferes with official duties so that services to the community are not optimal, lack of civil servant discipline, lack of staff as assessors in assessment activities, and lack of response from Regional Apparatus Organizations (OPD) in reporting civil servants who wish to continue their education. **Conclusion :** that the implementation of the study permit policy and study assignments*

within the Palangkaraya City Government is still not running effectively due to obstacles that occur in implementing the policy.

Keywords : Policy Implementation, Study Permit, Study Assignments

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan (GAP) : Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan kompetensi dari sumber daya aparaturnya salah satunya melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2015 tentang pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Beasiswa Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengimplementasiannya. **Tujuan :** untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar di Kota Palangka Raya, faktor penghambat serta upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya dalam mengatasi hambatan yang terjadi. **Metode :** penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *quota sampling*. Data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data berupa data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi data. Analisis data menggunakan teori Edwards III (1980) tentang Implementasi Kebijakan. **Hasil :** pelaksanaan izin belajar yang mengganggu tugas dinas sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksima, kurangnya disiplin PNS, kurangnya staf sebagai asesor dalam kegiatan *assessment*, dan kurangnya respon dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaporkan PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya. **kesimpulan :** bahwa implementasi kebijakan izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya masih belum berjalan dengan efektif dikarenakan hambatan yang terjadi di dalam implementasi kebijakannya.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Izin Belajar, Tugas Belajar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu organisasi maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat kualitas maka akan semakin optimal juga dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pengembangan SDM memiliki seperti yang diungkapkan oleh Sedarmayanti (2007:167) yaitu menghasilkan kerangka kerja yang bertalian secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan di mana karyawan didorong belajar dan berkembang. Pengembangan sumber daya aparatur diatur menjadi salah satu hak yang menjadi amanat dalam Undang – Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu wujud dari upaya pemerintah dalam memberikan pedoman dan regulasi yang jelas terkait hak dan kesempatan, yang tertuang dalam pasal 70 pada ayat (1) dan ayat (2), di mana setiap ASN memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengembangan kompetensi baik melalui Pendidikan dan Latihan, kursus, penataran, dan sejenisnya serta dalam rangka pengembangan kompetensi diri pegawai maka setiap instansi diwajibkan untuk membuat perencanaan pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pengembangan aparatur harus sesegera mungkin diupayakan untuk mengantisipasi kompleksitas tugas dan permasalahan yang akan dihadapi baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sangatlah penting. Berdasarkan kebijakan ketentuan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dinyatakan bahwa izin belajar dan tugas belajar dapat dilaksanakan oleh PNS daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Palangka Raya yang ditetapkan dengan dibuatnya surat keputusan Walikota. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala sehingga implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar masih belum berjalan dengan efektif. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya**”.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP)

Dalam pelaksanaan izin belajar dan tugas belajar masih didapati Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan pendidikan lanjutannya terlebih dahulu tanpa adanya surat keputusan dari Walikota Palangka Raya dikarenakan PNS tersebut tidak ingin melakukan perkuliahan di luar wilayah kota Palangka. Jika seorang PNS melanjutkan pendidikannya tanpa mendapatkan surat keputusan izin belajar ataupun tugas belajar dari pejabat yang berwenang sampai dengan waktu pendidikannya selesai, gelar yang didapat tidak dapat diakui secara sah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, terkait pelaksanaan izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah. Tinjauan ini dilakukan untuk membandingkan kesamaan maupun perbedaan dari penelitian terdahulu. Penelitian Fitriani berjudul *Implementasi Kebijakan Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)* (Fitriani, 2017), menemukan bahwa masih adanya kelemahan proses dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui Pendidikan formal berupa izin belajar sehingga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Penelitian Salina et al yang berjudul *Penerapan Kebijakan Izin Belajar dan Tugas Belajar Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru* menemukan bahwa penerapan kebijakan izin belajar dan

tugas belajar bagi PNS di kota Pekanbaru sudah berlangsung dengan baik namun dalam proses penerapan kebijakannya masih tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disebabkan oleh tidak lengkapnya hal yang diatur di dalam kebijakan tersebut, pengawasan serta keragaman program studi/jurusan yang masih kurang (Salina et al, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Yurianasanti yang berjudul *Kebijakan Hukum Pemberian Izin Belajar Bagi PNS di Pemerintah Kabupaten Malinau* yang menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam program izin belajar di lingkungan pemerintah kabupaten malinau yang disebabkan masih terbatasnya universitas di sekitar kabupaten malinau yang memiliki akreditasi yang sesuai, tidak adanya ketentuan terkait batas waktu lamanya pelaksanaan izin belajar, terbatasnya APBD kabupaten Malinau terkait anggaran program belajar, adanya pengaruh politik bagi penentuan PNS yang mengajukan permohonan izin belajar, serta tugas pengawasan dari PKD yang masih kurang tegas (Yurianasanti, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Sulistiana et al yang tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kabupaten Sintang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena masih adanya penyimpangan yang dilakukan oleh PNS yang melanjutkan Pendidikan (Sulistiana et al, 2013). Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Susilowati yang berjudul *Analisis Perwali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peningkatan dan Penyesuaian Pendidikan Bagi PNS Daerah* menyatakan bahwa terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan di dalam perwali tersebut terkait pelaksanaan Pendidikan PNS yang dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan public William dunn(1998) (Susilowati, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, di mana penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian tugas belajar, izin belajar, dan beasiswa bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan berbeda dengan teori – teori yang digunakan oleh para peneliti pada penelitian yang dilakukan Aida, Salina et al, Yurianasanti, Sulistiana et al, dan Susilowati, penulis menggunakan teori Edwards III (1980) dengan 4 (empat) indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980:10).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan walikota nomor 49 tahun 2015 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan karakteristik utama berisi informasi umum yang didapatkan dari wawancara mendalam. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang yang terdiri dari kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota Palangka Raya, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Analis Pendidikan dan Pelatihan, PNS yang melaksanakan izin belajar dan tugas belajar. Adapun analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (1994) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh Edwards III (1980).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan menggunakan pendapat ahli yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif jika memenuhi empat faktor yaitu, *communication, research, disposition, dan bureaucratic structure* (Edwards III, 1980:10).

3.1 *Communication*

Penulis melakukan wawancara terkait bagaimana komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan terkait izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Menurut Edwards III (1998:17) menyatakan ada tiga hal penting dalam proses komunikasi diantaranya yaitu : kejelasan, konsistensi, dan transmisi.

Menurut indikator kejelasan agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya maka informasi yang diberikan bukan hanya diterima oleh pelaksana kebijakan. Komunikasi harus jelas dalam penyampaian sasaran dan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat kepada PNS dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam hal ini terkait kejelasan informasi pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kota Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa informasi telah disampaikan secara rinci dan jelas sesuai dengan Peraturan Walikota yang berlaku sehingga pegawai BKPSDM Kota Palangka Raya dapat mengimplementasikan peraturan walikota

tersebut dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan informasi agar mengurangi kebingungan dan mempermudah dalam proses pemberian izin belajar dan tugas belajar. Berdasarkan dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa, informasi yang diberikan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya dengan OPD yang lain sudah jelas karena sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Beasiswa Bagi PNS di Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga dapat dikatakan dalam implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya pada indikator kejelasan sudah sesuai sehingga dapat dikatakan indikator kejelasan ini sudah terpenuhi.

Pada indikator konsistensi dijelaskan bahwa Keselarasan pesan dan arahan yang diterima oleh para pelaksana kebijakan tidak boleh bertentangan satu sama yang lainnya dan harus sesuai sehingga menghindari kebingungan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada Palangka Raya konsistensi telah terpenuhi karena informasi yang didapatkan oleh PNS di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015. Selain itu berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat brosur dan juga *banner* yang berisikan informasi yang berkaitan persyaratan dan proses bagaimana pengajuan izin belajar dan tugas belajar yang sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya dan informasi tambahan lainnya terkait dengan tanggal serta layanan yang dapat dihubungi jika terdapat kendala dalam proses pengajuan ataupun jika ingin mengetahui informasi lainnya. dari hasil analisis antara data dan teori implementasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan ini BKPSDM Kota Palangka Raya telah konsisten dalam memberikan informasi terkait izin belajar dan tugas belajar karena tindakan dan sikap yang diambil oleh BKPSDM Kota Palangka Raya telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang disampaikan melalui surat edaran.

Pada Palangka Raya transmisi dijelaskan bahwa transmisi merupakan penyampaian informasi terkait pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya dapat tersampaikan dari BKPSDM Kota Palangka Raya kepada OPD yang lainnya. Komunikasi akan berjalan efektif jika para pejabat dan pegawai yang berwenang dapat memastikan pesan dan intruksi terkait pemberian izin belajar dan tugas belajar dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat kepada pihak terkait. Informasi yang tepat, bersifat jelas dan relevan dapat disampaikan melalui berbagai media, baik berupa tatap muka, jejaring *online*/media social maupun dalam surat resmi. Berdasarkan hasil wawancara kesesuaian antara tindakan dan arahan sudah dilaksanakan dengan baik oleh BKPSDM Kota Palangka Raya. Selain itu juga, penyampaian informasi dilakukan jauh – jauh hari sebelum waktu pelaksanaan melalui media formal berupa surat edaran yang diketahui oleh Walikota maupun sosialisasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya itu sendiri. Selain itu, dari hasil wawancara kepada PNS yang melaksanakan izin belajar dapat kita ketahui bahwa transmisi yang digunakan oleh BKPSDM kota Palangka Raya dalam menyebarkan informasi terkait izin belajar dan tugas belajar sudah terpenuhi baik melalui kegiatan

sosialisasi dan juga melalui surat edaran. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yaitu masih saja adanya sikap abai terhadap informasi tersebut. Kurangnya respon dari OPD di Kota Palangka Raya dalam pelaporan PNS yang ingin mengajukan izin belajar dan tugas belajar akan menghambat dalam implementasi kebijakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut berdasarkan teori Edwards III (1980:10) berkaitan transmisi sehingga komunikasi yang terjadi tidak berjalan dengan efektif.

3.2 Resource

Penulis melakukan wawancara terkait sumber daya yang ada di BKPSDM Kota Palangka Raya yang terjadi dalam implementasi kebijakan terkait izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Menurut Edwards III (1980:10) terdapat 4(empat) sumber daya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat berjalan efektif yaitu staf, wewenang dalam pelaksanaan, fasilitas, dan informasi.

Menurut Edwards III (1980:54) menyatakan bahwa staf dalam implementasi kebijakan merupakan hal yang penting. Bukan hanya berkaitan dengan jumlahnya saja namun staf profesional yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam manajemen SDM harus dapat bertanggungjawab untuk menyediakan layanan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaannya jumlah staf tersebut akan mempengaruhi kapasitas pelaksanaan kebijakan karena jika jumlah staf yang tercukupi maka tugas terkait implementasi kebijakan izin belajar dan tugas belajar dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Menurut hasil wawancara bersama Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kota Palangka Raya dapat diketahui bahwa staf yang menjalankan wewenang dalam implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya masih belum tercukupi. Pegawai yang menjabat sebagai Asesor Ahli masih dibutuhkan dalam kegiatan *assessment* yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan teori Edwards III (1980) masih belum sesuai sehingga dapat dikatakan masih belum berjalan dengan efektif.

Menurut Edwards III (1980:66) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dibutuhkan otoritas dalam pelaksanaannya. Wewenang yang tepat diberikan kepada pejabat dan pegawai sangatlah penting agar memastikan bahwa kebijakan izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif. Penugasan dan pemberian tanggungjawab kepada para pegawainya dapat dilakukan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kebijakan tersebut yang berkaitan dengan penentuan peran, tanggung jawab, dan tugas yang jelas kepada pelaksana atau pegawai di bawahnya agar dapat dipastikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan implementasi izin belajar dan tugas belajar di Kota Palangka Raya berjalan dengan baik dan sesuai. Menurut hasil wawancara bersama Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM

Kota Palangka Raya dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan wewenangnya terdapat Peraturan yang mendasari pelaksanaannya. Dalam hal ini BKPSDM Kota Palangka Raya memiliki kedudukan dan fungsi yang jelas dalam pemerintahan Kota Palangka Raya untuk mengurus bidang pemberian tugas belajar, izin belajar, maupun beasiswa bagi para PNSnya sehingga dalam melakukan koordinasi dengan OPD lainnya dapat berjalan secara terstruktur. Selain itu, BKPSDM memiliki kepastian hukum dan juga memiliki batasan – batasan dari tanggungjawab dalam wewenangnya sehingga di dalam pelaksanaannya peraturan – peraturan yang menjadi landasan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan wewenangnya, dalam hal ini berkaitan dengan teori Edwards III (1980) terkait indikator wewenang telah terpenuhi.

Menurut Edwards III (1980:77) menyatakan bahwa tanpa adanya bangunan dan kelengkapannya maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan sukses. Jika dikaitkan dengan teori ini maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kota Palangka Raya pada indikator fasilitas sudah terpenuhi, hal ini dikarenakan oleh fasilitas yang dimiliki oleh BKPSDM Kota Palangka Raya yaitu terkait bangunan, ruangan, meja dan computer untuk pelaksanaan dinas sehari – hari, kebutuhan *assessment* serta printer telah tercukupi dan mampu menunjang dalam pelaksanaan kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Kota Palangka Raya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayan serta akan meningkatkan efisiensi serta efektifitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PNS.

Menurut Edwards III (1980:67) menyatakan bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana akan mengetahui apa saja yang dilakukan dan bagaimana caranya melalui informasi. Menurut hasil wawancara bersama Pegawai Negeri Sipil sebagai Analis Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur di BKPSDM Kota Palangka Raya dapat diketahui bahwa telah adanya ketersediaan informasi terkait persyaratan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh PNS di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya jika ingin melaksanakan Pendidikan dengan melaksanakan izin belajar dan tugas belajar sehingga jika dianalisis menggunakan teori Edwards III (1980) sudah sesuai karena terkait indikator informasi pada dimensi sumber daya telah terpenuhi.

3.3 Disposition

Penulis melakukan wawancara terkait disposisi yang ada di BKPSDM Kota Palangka Raya yang terjadi dalam implementasi kebijakan terkait izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya agar dapat berjalan dengan efektif maka pegawai BKPSDM Kota Palangka Raya harus memiliki perilaku yang sesuai agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Menurut hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kota

Palangka Raya dapat diketahui bahwa BKPSDM Kota Palangka Raya memiliki perilaku yang proaktif dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Walikota terkait izin belajar dan tugas belajar. perilaku tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya sosialisasi serta pendampingan melalui konsultasi di BKPSDM Kota Palangka Raya dalam rangka membantu PNS mengatasi kendala dalam proses pengajuan permohonan izin belajar dan tugas belajarnya. Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti perilaku yang ditunjukkan oleh pegawai di BKPSDM Kota Palangka Raya menunjukkan adanya perilaku kooperatif antar pegawainya, hal tersebut dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan antar pegawai pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015. Jika dianalisis dengan teori Edwards III (1980) dapat dikatakan bahwa pada implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah sesuai dan dalam perilaku sehari – harinya telah menunjukkan sikap disiplin yang membuat pelaksanaan tugas sehari – hari terkait izin belajar dan tugas berjalan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat dikatakan pada indikator perilaku sudah terpenuhi.

Selain itu sikap yang diambil oleh BKPSDM Kota Palangka Raya agar implementasi dari kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar berjalan dengan efisien dan efektif maka yang harus dilakukan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya sebagai upaya dalam memperbaiki dan mengurangi hambatan yang terjadi yaitu dengan melakukan evaluasi. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya dapat diketahui bahwa BKPSDM Kota Palangka Raya telah menyikapi salah satu hambatan yang terjadi melakukan upaya dalam menyesuaikan kebijakan yang berkaitan dengan izin belajar dan tugas belajar agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini baik dalam memberikan tugas dinas kepada PNSnya maupun penggunaan teknologi dalam proses perkuliahannya. Selain itu, BKPSDM Kota Palangka Raya bersikap tegas terhadap para PNS yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan izin belajar dan tugas belajar yang di tunjukan dengan memberikan sanksi disiplin kepada PNS tersebut agar dapat dijadikan pelajaran bagi PNS yang lainnya. Maka dari itu, jika dianalisis menggunakan teori Edwards III(1980) sikap yang diambil oleh BKPSDM Kota Palangka Raya telah sesuai dengan kebijakan yang mengaturnya.

3.4 Bureaucratic structure

Penulis melakukan wawancara terkait struktur birokrasi yang ada di BKPSDM Kota Palangka Raya yang terjadi dalam implementasi kebijakan terkait izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Edwards III (1980) menyatakan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan pada struktur birokrasi yang menjalaninya harus memiliki standar operasional kerja menjadi sangat penting, karena walaupun sudah tersedianya sumber daya, para pelaksana kebijakan yang paham akan tanggung jawabnya dan memiliki keinginan

untuk melaksanakan kebijakan namun jika implementasi kebijakannya bisa saja belum efektif ketika struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan masih tidak efisien. Berdasarkan hasil wawancara tersebut pula dapat kita ketahui yaitu standar operasional kerja yang telah ditentukan dapat dirumuskan sebagai rencana strategis jangka panjang terkait pola karier dan jenjang pendidikan PNS pada OPD yang lain.

Menurut hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kota Palangka Raya dapat diketahui bahwa BKPSDM Kota Palangka Raya dalam implementasi kebijakan izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah memiliki Standar Operasional Kerja yang terperinci dan juga terstruktur, sehingga jika dianalisis dengan teori Edwards III (1980) dapat dinyatakan bahwa BKPSDM Kota Palangka Raya memiliki SOP yang sudah disesuaikan sehingga pada indikator Struktur birokrasi telah terpenuhi.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sangat berdampak positif bagi para PNS maupun OPD tempatnya berdinamikan namun dalam implementasi kebijakannya jika dianalisis menggunakan teori Edwards III (1980) ternyata terdapat beberapa hal yang menjadikan implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam implementasi kebijakan tersebut peran BKPSDM Kota Palangka Raya, OPD dan unsur lainnya sangatlah penting agar tujuan implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat tercapai. Selain itu, sikap disiplin dari PNS yang melaksanakan izin belajar dan tugas belajar juga sangat menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana et al yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena masih adanya penyimpangan yang dilakukan PNS (Sulistiana et al, 2013) serta layaknya hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (Fitriani, 2017). Dalam implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Palangka Raya Pegawai BKPSDM Kota Palangka Raya sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan kebijakan dan SOP yang ada. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Salina et al sehingga diharapkan mampu untuk memberikan kepuasan kepada PNS yang mengajukan permohonan izin belajar dan tugas belajar (Salina et al, 2021). Kejelasan dari kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar juga menjadi hal yang penting agar tidak membingungkan dan mudah dipahami agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, layaknya penelitian oleh Sulisowati kelebihan dari Peraturan Walikota yang mengatur terkait Pedoman Peningkatan dan Penyesuaian Pendidikan bagi PNS daerah sama-sama memiliki kelebihan yaitu persyaratan, jangka waktu pelaksanaan, serta pedoman tata cara permohonan izin belajar (Susilowati, 2016). Pentingnya evaluasi dalam

implementasi kebijakan dalam pemberian izin belajar dan tugas belajar dilakukan agar dapat mengetahui hambatan yang terjadi dan agar dapat mencari solusi dari hambatan tersebut selayaknya penelitian yang dilakukan oleh Yurianasanti dan Fitriani. Keterbatasan universitas di wilayah tempat dinas yang menjadi tujuan PNS dalam melaksanakan izin belajar menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program izin belajar hal ini sama seperti hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yurianasanti terkait problematika dari kebijakan pemberian izin belajar bagi PNS di Pemerintah Kabupaten Malinau (Yurianasanti, 2022).

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penting yang lainnya dari implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu masih adanya PNS yang kurang sadar PNS akan pentingnya disiplin pegawai, sumber daya yang harus terpenuhi agar implementasi dapat berjalan lebih efektif, serta kebaruan regulasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980:10) masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat indikator pada teori yang masih belum terpenuhi, yaitu : *pertama*, indikator transmisi pada dimensi komunikasi yang disebabkan masih adanya sikap abai dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaporkan siapa saja pegawainya yang ingin mengajukan pendidikan lanjutannya sehingga komunikasi berjalan tidak efektif. *Kedua*, indikator staf dalam dimensi sumber daya yang disebabkan jumlah staf dalam proses pelaksanaan uji kompetensi atau *assessment* hanya terdiri dari 2 (dua) orang sehingga beban kerja pegawai tersebut menjadi lebih besar. *Ketiga*, indikator sikap pada dimensi disposisi yang disebabkan masih terdapat PNS yang melaksanakan pendidikan lanjutan tanpa memiliki izin belajar yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat izin belajar oleh Walikota Palangka Raya selain itu juga pelaksanaan izin belajar yang mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan karena kegiatan perkuliahan yang bersamaan dengan waktu berdinis.

Upaya yang telah dilakukan BKPSDM Kota Palangka Raya dalam mengatasi hambatan yang ada di antaranya yaitu : *pertama*, mengajukan permintaan pegawai baru untuk mengisi posisi dan jabatan sebagai asesor dalam menunjang ke efektifan kinerja OPD terkait izin belajar dan tugas belajar. *Kedua*, mengajukan rencana perubahan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan pendidikan lanjutan berupa izin belajar dan tugas belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. *Ketiga*, memberikan sanksi kepada para PNS yang mengajukan permohonan untuk melakukan

izin belajar setelah melaksanakan perkuliahan. *Keempat*, memberikan pelayanan kepada PNS yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan izin belajar dan tugas belajar dengan membuka layanan konsultasi.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada BKPSDM Kota Palangka Raya, yaitu : *pertama*, dapat dilakukannya monitoring serta evaluasi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pemberian izin belajar dan tugas belajar. *Kedua*, dapat dilakukannya peningkatan kepada akses informasi mengenai persyaratan dan informasi tambahan lainnya di dalam *website* yang dimiliki oleh BKPSDM Kota Palangka Raya. *Ketiga*, dapat meningkatkan kualitas konsultasi dengan membuka sesi konsultasi secara *online* dan *realtime* agar pelayanan yang diberikan dapat lebih efisien dan efektif. *Keempat*, pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dapat memberikan dukungan kepada BKPSDM Kota Palangka Raya dan juga OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari aparatur serta fasilitas yang dapat membantu terkait dengan izin belajar dan tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Keterbatasan Penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu sehingga kegiatan tidak dapat diobservasi dengan maksimal dikarenakan dilakukan setelah waktu penelitian selesai.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : peneliti masih menyadari terdapat perubahan peraturan dan perubahan lainnya yang terjadi menyesuaikan dengan perkembangan kompleksitas pekerjaan PNS dan teknologi yang semakin canggih, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dapat menemukan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian ini, serta seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan di dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Edwards, George C. (1980). *Iplementing Public Policy*
- Enny, M. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya : UBHARA Manajemen Perss
- Fitriani, A. (2017). *Implementasi Kebijakan Ketentuan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Fokus, jilid 15, No.1 Maret 2017, Hal.34-35
- Marnis, P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo : Zifatama Publisher
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed). California : SAGE Publication

- Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Assex: Pearson Education Limited
- Notoadmodjo, S. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Salina, et al. (2021). *Penerapan Kebijakan Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Pekanbaru*. Jurnal Niara. Vol.14 No.1 Mei 2023, Hal. 228-241
- Sugiyono, (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Yogyakarta : Alfabeta
- Sulistiana, et al. (2013). *Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang*
- Susilowati, E. (2016) *Analisis Perwali Kota Surakarta No.7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peningkatan dan Penyesuaian Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah*.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Izin Belajar dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, Studi Kasus*. Yogyakarta : PT CAPS
- Yurianasanti. (2022). *Kebijakan Hukum Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Malinau*.

